JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI KARIAS KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

Putri[1], Siti Raudah[2], Siti Paulina[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: putriputri8340@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya penegakan aturan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi dengan pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi, member check, ketekunan pengamatan, serta teknik pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal. Kelemahan utama terlihat pada pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana pendukung, pengembangan usaha berbasis pengelolaan sampah, serta penyebaran informasi yang belum berlangsung secara berkesinambungan. Meskipun demikian, penyampaian informasi melalui komunikasi langsung dan media WhatsApp telah berjalan cukup baik. Keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan, dan kurangnya penyebaran informasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan pemerintah desa melalui penyediaan fasilitas, pembentukan bank sampah, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dan edukasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The implementation of community empowerment in waste management in Sungai Karias Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency has not yet achieved the expected outcomes due to several existing constraints. This research was conducted to examine the implementation of community empowerment in waste management and to identify the factors that support and hinder its effectiveness. The study adopted a descriptive qualitative approach by collecting data through interviews, field observations, and documentation involving 11 informants selected using purposive sampling. The collected data were processed through data condensation, data presentation, conclusion drawing, and verification, while data validity was ensured through triangulation, prolonged engagement, member checking, and other credibility techniques. The findings reveal that community empowerment activities remain less effective, particularly in improving community capacity, strengthening waste management institutions, providing adequate facilities, developing waste-based economic initiatives, and delivering continuous public education. In contrast, communication between stakeholders through face-to-face interactions and WhatsApp has contributed positively to information dissemination. The availability of temporary waste collection sites and the community's willingness to participate serve as supporting factors, whereas budget limitations, inadequate training programs, and insufficient public outreach continue to impede program implementation. Strengthening government support through improved infrastructure, the establishment of community-based waste banks, sustained mentoring, and broader educational initiatives is essential to enhance community participation and achieve more effective waste management.

Keywords**:** *community empowerment, waste management, community, participation*

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas manusia berdampak pada bertambahnya volume serta keragaman sampah yang dihasilkan setiap hari. Sampah merupakan sisa

aktivitas manusia maupun proses alam berbentuk padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena apabila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan pencemaran, menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu estetika, menyumbat saluran air, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Desa Sungai Karias merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai persoalan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa, timbulan sampah diperkirakan mencapai 1.000–1.500 kg per hari yang didominasi oleh sampah organik. Namun, kapasitas pengangkutan sampah belum mampu menjangkau seluruh volume yang dihasilkan sehingga sebagian sampah masih dibakar atau dibuang ke lokasi yang tidak semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dan mendorong pelaksanaan program Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu belum optimalnya penegakan aturan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pembuangan sampah sesuai ketentuan, serta terbatasnya fasilitas pendukung, khususnya sarana pengolahan dan daur ulang sampah. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan masih terjadinya penumpukan sampah, pembuangan ke sungai, dan pembakaran sampah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, melainkan juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Ahmad Mulyadi (2019) berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang melibatkan informan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Kelompok Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum maksimalnya dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan penguatan kemitraan. Selain itu, rendahnya kepercayaan diri masyarakat, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi dengan pihak eksternal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, serta penyediaan teknologi pengolahan sampah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hasil pengelolaan sampah rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarda Hayrani (2019) berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta melibatkan delapan informan yang terdiri atas informan utama dan informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, antara lain pemilahan, pengurangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sampah secara sistematis. Pelaksanaan program tersebut memberikan manfaat berupa meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, bertambahnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah, serta munculnya peluang ekonomi dari pemanfaatan sampah yang bernilai guna.

Menurut Mardikanto dan Subiato (2019:27), pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, maupun aspirasi, serta mendorong kemampuan dalam menentukan pilihan terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat

Menurut Mustanir, Hamid, dan Syarifuddin (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup, mencapai kesejahteraan, dan mewujudkan kemandirian melalui penyelesaian berbagai permasalahan, baik secara individu maupun secara kolektif. Keberhasilan proses tersebut memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan, pendampingan, dan kesempatan kepada masyarakat agar hasil pemberdayaan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurut Sangkapura dalam Ruth dan Dewi (2020:6), sampah merupakan sisa dari aktivitas manusia maupun proses alami yang berbentuk padat atau semi padat, baik berupa bahan organik yang dapat terurai maupun bahan anorganik yang sulit terurai. Material tersebut dipandang tidak lagi memiliki nilai guna sehingga dibuang ke lingkungan dan berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi di lapangan secara mendalam serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias. Melalui tipe penelitian ini, berbagai fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhinya dideskripsikan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Karias. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang pengelolaan sampah. Selain itu, lokasi ini dinilai sesuai dengan fokus penelitian karena memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, tingkat partisipasi warga, serta berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan sampah

di tingkat desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan informasi dari para informan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, laporan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan untuk mendukung dan melengkapi data primer.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias.

PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Karias

Penelitian ini membahas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, termasuk pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Analisis penelitian mengacu pada strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Subiato (2019).

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas individu melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar mampu berpartisipasi secara lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi maupun kegiatan pemberdayaan. Proses ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pembinaan, seperti pelatihan, pendidikan, pendampingan, dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.

   a. Peningkatan Pengetahuan

      Peningkatan pengetahuan merupakan proses pengembangan pemahaman individu terhadap suatu informasi atau keterampilan melalui pembelajaran, pelatihan, pengalaman, maupun interaksi dengan lingkungan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami permasalahan, menentukan solusi yang tepat, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih positif dan produktif.

      Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah tergolong cukup baik. Sebagian besar masyarakat telah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan, bahkan sebagian telah menggunakan wadah khusus untuk menampung sampah rumah tangga sebelum diangkut oleh petugas. Keberadaan layanan pengangkutan sampah secara

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

rutin turut mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah masih terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, masih ditemukan sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau belum menerapkan pemilahan sampah sesuai jenisnya.

b. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat menunjukkan sejauh mana pemahaman, kepedulian, dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyikapi suatu permasalahan. Kesadaran tersebut tercermin melalui sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di masih tergolong kurang baik. Sebagian masyarakat telah membuang sampah pada tempat yang disediakan, mengikuti kegiatan gotong royong, dan menjaga kebersihan lingkungan. Namun, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai serta belum melakukan pemilahan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah masih didominasi oleh petugas pengangkut sampah, sedangkan partisipasi aktif masyarakat belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara optimal.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pengembangan kelembagaan kelompok merupakan upaya memperkuat organisasi masyarakat melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan kemampuan pengelolaan, kerja sama antaranggota, dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Kelembagaan yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat serta mendukung penyelesaian berbagai permasalahan secara bersama.

a. Penegakan Hukum

Kelompok pengelola sampah merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terkoordinasi. Kelompok ini berperan dalam kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pengawasan pengelolaan sampah guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah pada aspek kelembagaan kelompok tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas petugas pengelola sampah serta pelaksanaan pengangkutan sampah secara rutin setiap satu minggu sekali. Selain itu, ketersediaan tempat sampah di beberapa titik permukiman turut mendukung kelancaran pengelolaan sampah. Namun, kelembagaan pengelola sampah masih belum berkembang secara optimal karena kegiatan yang dilakukan masih berfokus pada pengangkutan sampah, sedangkan pemilahan, pengolahan, dan pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Keterbatasan jumlah petugas serta belum kuatnya koordinasi kelembagaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

b. Kerjasama Kelembagaan

Kerja sama dengan pihak eksternal bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui dukungan berupa pendampingan, pelatihan, penyediaan sarana, maupun bantuan lainnya. Dalam pengelolaan sampah, kolaborasi tersebut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program, memperluas jejaring, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama kelembagaan pengelolaan sampah masih tergolong kurang baik. Pengelolaan sampah masih dilakukan secara mandiri oleh petugas desa dan belum didukung oleh kemitraan yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah, pihak swasta, maupun lembaga lainnya. Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal masih bersifat insidental, seperti sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa, serta belum berkembang menjadi program yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak belum berjalan optimal sehingga dukungan terhadap pengelolaan sampah masih terbatas.

3. Pemupukan Modal Masyarakat (Swasta)

Pemupukan modal masyarakat merupakan upaya memperkuat kemandirian ekonomi melalui dukungan pendanaan, kemitraan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Dalam pengelolaan sampah, dukungan tersebut dapat meningkatkan efektivitas program, mendorong kegiatan produktif, dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, seperti melalui pengembangan bank sampah atau usaha daur ulang.

a. Efisiensi Penggunaan Modal

Efisiensi penggunaan modal merupakan upaya memanfaatkan dana dan sumber daya secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program. Pengelolaan modal yang efektif dilakukan melalui penentuan prioritas, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta pengelolaan yang transparan sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan modal dalam pengelolaan sampah masih tergolong kurang baik. Kondisi ini ditandai dengan belum terbentuknya bank sampah, belum adanya sistem pengelolaan dana yang terstruktur, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pengelolaan sampah masih berfokus pada kegiatan pengangkutan sehingga belum mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemupukan modal masyarakat belum berjalan optimal.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Sarana meliputi berbagai peralatan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional, sedangkan prasarana berupa fasilitas pendukung yang menunjang kelancaran proses pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana pengelolaan sampah tergolong baik. Fasilitas yang tersedia berupa mobil pengangkut sampah dan tempat sampah di beberapa titik telah mendukung proses pengumpulan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun demikian, kapasitas kendaraan yang terbatas menyebabkan pengangkutan dilakukan secara bergiliran antar RT. Temuan ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana telah mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah, namun pengembangannya masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

yang lebih memadai.

4. Pengembangan Usaha Produktif

Dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha produktif bertujuan mendorong masyarakat agar mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki. Dalam pengelolaan sampah, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan bank sampah, usaha daur ulang, maupun pemanfaatan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

a. Jumlah Usaha Produktif yang Dikembangkan

Jumlah usaha produktif mencerminkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan sampah, usaha produktif dapat berupa bank sampah, kegiatan daur ulang, maupun pemanfaatan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan usaha produktif dalam pengelolaan sampah masih tergolong kurang baik. Pengelolaan sampah masih terbatas pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya pengolahan yang menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu, belum terbentuknya bank sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum adanya pengelola khusus menjadi kendala dalam pengembangan usaha berbasis sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi sampah sebagai sumber ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif belum terlaksana dengan baik.

b. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan merupakan upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dan mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sampah tergolong kurang baik. Pengelolaan sampah masih terbatas pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga belum menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, belum adanya bank sampah, kegiatan daur ulang, maupun usaha berbasis pengelolaan sampah menyebabkan potensi sampah sebagai sumber pendapatan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal.

5. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Penyediaan informasi tepat guna merupakan upaya menyampaikan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mendorong masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

a. Pemanfaatan Informasi

Pemanfaatan informasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan masyarakat untuk memahami dan menerapkan informasi yang diterima guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mendukung pengelolaan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan informasi mengenai pengelolaan sampah masih tergolong kurang baik. Informasi yang diterima masyarakat umumnya terbatas pada imbauan menjaga kebersihan dan jadwal pengangkutan sampah, sedangkan edukasi mengenai pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah belum dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, belum terdapat program sosialisasi atau pendampingan yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi tepat guna sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal sehingga pemanfaatan sampah sebagai sumber daya maupun peluang ekonomi belum berkembang secara maksimal.

b. Umpan Balik Masyarakat

Umpan balik masyarakat merupakan tanggapan, saran, kritik, atau penilaian yang disampaikan masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme umpan balik masyarakat terkait pengelolaan sampah tergolong baik. Masyarakat dapat menyampaikan saran, keluhan, maupun informasi secara langsung kepada pemerintah desa atau melalui grup WhatsApp. Meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik, mekanisme pengelolaan umpan balik masih bersifat informal dan belum didukung oleh sistem yang terstruktur. Selain itu, tindak lanjut terhadap beberapa masukan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.

c. Sistem Komunikasi Informasi yang Berkelanjutan

Sistem komunikasi informasi yang berkelanjutan merupakan mekanisme penyampaian informasi yang dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkesinambungan antara pengelola program dengan masyarakat. Sistem ini bertujuan memastikan informasi selalu diperbarui, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem komunikasi informasi dalam pengelolaan sampah tergolong baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah desa, BPD, dan petugas pengelola sampah, serta didukung oleh grup WhatsApp untuk mempercepat penyampaian informasi dan keluhan. Meskipun demikian, sistem komunikasi masih bersifat sederhana dan belum memiliki mekanisme yang terstruktur serta terdokumentasi secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi telah mendukung partisipasi masyarakat, namun masih perlu dikembangkan agar penyebaran informasi dan koordinasi dalam pengelolaan sampah dapat berlangsung lebih efektif dan berkesinambungan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Karias

1. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Tempat Penampungan (TPS)

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam pengelolaan sampah meliputi ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta dukungan dari pemerintah desa

dan masyarakat. Keberadaan TPS membantu proses pengumpulan sampah sebelum dilakukan pengangkutan, sedangkan peran aparat desa mendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, dukungan yang tersedia masih sebatas pada kegiatan dasar seperti pengumpulan dan pengangkutan sampah, belum berkembang pada pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi seperti bank sampah atau usaha daur ulang. Dengan demikian, faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat sudah tersedia, tetapi masih perlu dikembangkan.

b. Kesadaran Masyarakat yang Cukup Baik

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran masyarakat tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya perilaku masyarakat yang mulai membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti arahan terkait pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat karena adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum konsisten menerapkan pengelolaan sampah dengan baik, sehingga diperlukan peningkatan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar partisipasi masyarakat dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

a. Anggaran Dana yang Dialokasikan

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pemenuhan kebutuhan operasional, seperti perbaikan kendaraan pengangkut sampah, penyediaan perlengkapan kerja petugas, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Keterbatasan sarana pendukung juga menyebabkan kegiatan pengelolaan sampah masih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan tanpa adanya pengolahan lanjutan seperti bank sampah atau usaha berbasis sampah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai agar sarana, prasarana, dan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

b. Kurangnya Informasi dan Pelatihan Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan menjadi salah satu faktor penghambat. Keterbatasan kegiatan edukasi menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah masih rendah, sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan secara sederhana berupa pengumpulan dan pembuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat belum berjalan optimal, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola sampah secara lebih efektif, mandiri, dan bernilai guna.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari beberapa aspek, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang belum maksimal karena peningkatan pengetahuan masyarakat masih rendah akibat belum adanya pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan, meskipun tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup

baik dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada aspek pengembangan kelembagaan kelompok, kerja sama dengan pihak eksternal masih terbatas dan penegakan hukum belum berjalan optimal karena sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan secara tegas. Selanjutnya, pada aspek pemupukan modal masyarakat, keterbatasan anggaran menyebabkan pengelolaan sampah belum didukung secara maksimal, termasuk pada sarana dan prasarana yang masih terbatas, terutama kendaraan pengangkut sampah. Pada aspek pengembangan usaha produktif, belum terdapat kegiatan ekonomi berbasis sampah seperti bank sampah maupun pengolahan sampah yang memiliki nilai jual. Sementara itu, pada aspek penyediaan informasi tepat guna, pemanfaatan informasi masih kurang optimal karena masyarakat belum memperoleh informasi secara luas dan berkelanjutan, meskipun penyampaian umpan balik serta komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa telah berjalan melalui komunikasi langsung maupun media WhatsApp.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Karias terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta adanya kesadaran masyarakat yang cukup baik terhadap kebersihan lingkungan. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan operasional pengelolaan sampah, serta kurangnya informasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada masyarakat sehingga pemahaman mengenai pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2013) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*. Indonesia.

Dewi, R.& (2020) *Pengelolaan Sampah dan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hayrani, S. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mulyadi, F.A. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*.

Subiato, M.& (2019) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, A.H.M.& (2019) "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif," *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2026) *Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angkat 2026*. Amuntai : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.